

Daftar Hasil Identifikasi, Analisis Dan Pemetaan Produk Hukum Daerah Kabupaten Klungkung Yang Tidak Harmonis
Data Per Desember 2019

No	Judul	Hasil Identifikasi, Analisis Dan Pemetaan	Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	6
1	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 1 Angka 6 Sudah Tidak Sesuai Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, • Pasal 3 Ayat (2) Huruf A Angka 5, Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf E Dan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Huruf E, Sudah Tidak Sesuai Dengan Kebijakan Bupati Untuk Membebaskan Waris Dari Objek Bphtb Sesuai Visi Misi Bupati Yang Tertuang Dalam Rpjmd Kab. Klungkung Tahun 2018-2023 	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Diubah
2	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	<p>Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Sudah Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf E Dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.</p> <p>Dalam Ketentuan Pasal 2 Huruf E, Perlu Ditambahkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sebagai Badan Tipe A Yang Melaksanakan Tugas Dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.</p> <p>Ketentuan Pasal 10 Yang Mengatur Tentang: (1) Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Yang Terbentuk Dengan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sebelum Perda Ini Berlaku, Tetap Melaksanakan Tugasnya Sampai</p>	Bagian Organisasi	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Diubah

		<p>Dengan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Diundangkan.</p> <p>(2) Dalam Hal Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tergabung Dengan Urusan Pemerintahan Lain, Perangkat Daerah Tersebut Hanya Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.</p> <p>(3) Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sampai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Diundangkan.</p> <p>Perlu Dihapus.</p> <p>Dalam Rangka Penambahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sebagai Perangkat Daerah Berbentuk Badan, Maka Perda Nomor 9 Tahun 2016 Perlu Diubah.</p>		
3	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Bahwa Dengan Adanya Penambahan Objek Dan Penyesuaian Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Maka Ketentuan Lampiran Perda Nomor 1 Tahun 2016 Perlu Diubah	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Diubah
4	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Bahwa Dengan Ditetapkannya Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Uptd Rumah Sakit Pratama Gema Santi Nusa Penida, Dan Penambahan Layanan Di Puskesmas Serta Penyesuaian Tarif Retribusi,	Dinas Kesehatan	Sudah Tidak Harmonis Dan Menghambat

		Maka Perda Nomor 14 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Kesehatan Perlu Diganti.		Birokrasi, Sehingga Perlu Diganti
5	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dengan Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Maka Lebih Dari 50 % Ketentuan Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Sudah Tidak Sesuai Sehingga Perlu Diganti.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Kb	Sudah Tidak Harmonis Dan Menghambat Birokrasi, Sehingga Perlu Diganti
6	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan	Dalam Rangka Penyesuaian Tarif Pajak Hiburan Di Kabupaten Klungkung Untuk Meningkatkan Ketaatan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hiburan, Maka Besaran Tarif Pajak 40% Yang Diatur Dalam 7 Perlu Diturunkan Sehingga Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Perlu Diubah.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Diubah
7	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung	Dengan berlakunya Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perlu menyesuaikan nomenklatur jabatan yang mengalami perubahan sehingga Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu diubah;	Bagian Organisasi	Sudah Tidak harmonis, Sehingga Perlu diubah
8	Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Kepada	Sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Bagian Organisasi	Sudah Tidak harmonis, Sehingga Perlu diubah

	Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil	di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamankan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada aparatur sipil negara berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum aparatur sipil negara sehingga Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil perlu diganti;		
9	Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Dalam rangka penyesuaian pengaturan terkait belanja tidak terduga dalam Penyusunan APBDesa yang belum diatur, maka Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 perlu diubah	DPMDPPKB	Sudah Tidak Harmonis, Perlu di Ubah
10	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial	Dengan berlakunya Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan perlunya mengatur bunga bank dan/atau sisa dana hibah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial berserta perubahannya perlu diubah;	BPKPD	Sudah Tidak Harmonis, Perlu di Ubah

11	Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame	Dalam rangka tertib penyelenggaraan reklame, baik secara teknis dan administrasi serta untuk terciptanya keindahan, kerapian dan terwujudnya estetika kota yang indah maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame sehingga Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame perlu diganti	DPMPTSP	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu di ganti
12	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pilkel	beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian <i>Perbekel</i> sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah	DPMDPPKB	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu di Ubah
13	Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial beserta perubahannya perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan hibah	BPKPD	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu di Ubah
14	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020	Dalam rangka penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa Tahun 2020 perlu penyesuaian pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020	DPMDPPKB	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu di Ubah
15	Peraturan Bupati Klungkung Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas	dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan	DPMPTSP	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu di Ubah

	Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung	Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung seperti penandatanganan secara elektronik, dan penambahan beberapa jenis izin		
16	Perbup Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020	Dalam rangka penyesuaian dengan Ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Perbup Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020 perlu diubah	Baperlitbang	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Diubah
17	Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020	Dalam rangka penyesuaian dengan Ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 perlu diubah	Baperlitbang	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Diubah
18	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020	Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan / Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, mengatur penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai alokasi Dasar untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota sehingga Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;	DPMDPPKB	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Di Ubah
19	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung	Dalam rangka penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung perlu diubah.	Bagian Organisasi	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Di Ubah

20	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung	Dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, perlu diubah	Bagian Organisasi	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Di Ubah
21	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2020	dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengatur mengenai penambahan jangka waktu bantuan pemberian bantuan langsung tunai Dana Desa, sehingga Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah	DPMDPPKB	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Di Ubah
22	Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung Dalam Pelayanan Dan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi tenaga Pendukung Dalam Pelayanan dan Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah	Dinas Kesehatan	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Di Ubah

23	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Dengan berlaku Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan perlu diganti	BPKPD	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Di ganti
24	Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa	Dengan berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa perlu diganti	DPMDPPKB	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Di ganti
25	Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa	Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa perlu diganti	DPMDPPKB	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu Di ganti
26	Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah	Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan	Bagian Organisasi	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu diubah

		kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah		
27	Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Klungkung	Adanya penyesuaian beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Klungkung, sehingga perlu diubah	BPKPD	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu diubah
28	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020	dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengatur mengenai penambahan jangka waktu bantuan pemberian bantuan langsung tunai Dana Desa, sehingga Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah	DPMDPPKB	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu diubah
29	Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan	dalam rangka penyesuaian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak	Setwan	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu diubah

	Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah		
30	Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Dan Pembayaran Jaminan Sosial Untuk <i>Perbekel</i> , Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa	dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa maka Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Dan Pembayaran Jaminan Sosial Untuk <i>Perbekel</i> , Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditinjau	DPMDPPKB	Sudah Tidak Harmonis, Sehingga Perlu diubah

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Klungkung,



Ni Made Sulistiawati, SH. MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19790610 200604 2 014